

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.2. Penelitian Sebelumnya**

Penelitian mengenai pengaruh *corporate social responsibility (CSR)* dan *corporate governance* terhadap nilai perusahaan ini menggunakan acuan penelitian terdahulu, yaitu yang dilakukan oleh Nurlela dan Islahudin (2008) yang meneliti tentang pengaruh CSR terhadap nilai perusahaan dengan prosentase kepemilikan manajemen sebagai variabel moderating pada semua perusahaan yang terdaftar di BEJ pada tahun 2005 selain bank dan lembaga keuangan. Dalam penelitian ini membahas tentang (a) apakah *Corporate Social Responsibility* mempengaruhi nilai perusahaan dan (b) apakah prosentase kepemilikan manajemen memiliki pengaruh sebagai variabel moderating dalam hubungan antara *Corporate Social Responsibility* dan nilai perusahaan. Hasil penelitiannya, yaitu *Corporate Social Responsibility (CSR)*, prosentase kepemilikan manajemen, serta interaksi antara *CSR* dengan prosentase kepemilikan manajemen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.

Wijayanti dkk (2011) meneliti tentang pengaruh CSR terhadap kinerja keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2008. Dalam penelitian ini mereka membahas apakah *corporate social responsibility* berpengaruh terhadap Kinerja Perusahaan yang diprosikan dengan menggunakan *Return on Asset (ROA)*, *Return on Equity*

(ROE) dan *Earning per Share* (EPS). Hasil penelitiannya, yaitu (1) *Corporate Social Responsibility* tidak berpengaruh signifikan terhadap *return on asset* (ROA), hanya kategori produk yang berpengaruh terhadap ROA; (2) CSR berpengaruh terhadap *return on equity* (ROE), tidak semua kategori berpengaruh secara signifikan hanya kategori lingkungan, kesehatan dan keselamatan tenaga kerja, dan produk yang berpengaruh signifikan positif; (3) Pada regresi yang dilakukan pada masing-masing kategori pengungkapan, tidak ada kategori yang mampu mempengaruhi *earning per share* (EPS).

Rustiarini (2010) melakukan penelitian tentang pengaruh *corporate governance* pada hubungan CSR dan nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2008. Dalam penelitiannya membahas tentang (a) apakah pengungkapan CSR berpengaruh terhadap nilai perusahaan; (b) apakah *corporate governance* yang diproksikan dengan kepemilikan manjerial, kepemilikan institutional, proporsi komisaris independen dan jumlah anggota komite audit berpengaruh terhadap nilai perusahaan; (c) apakah *corporate governance* berpengaruh terhadap hubungan pengungkapan CSR dengan nilai perusahaan. Hasil penelitiannya, yaitu pengungkapan CSR dan *corporate governance* berpengaruh terhadap nilai perusahaan dan interaksi CSR dan *corporate governance* menunjukkan tingkat signifikansi sebesar 0,016 yang berarti bahwa *corporate governance* berpengaruh pada hubungan pengungkapan CSR dengan nilai perusahaan.

Tumirin (2007) melakukan analisis tentang penerapan GCG (*Good Corporate Governance*) dan nilai perusahaan pada perusahaan yang terdaftar

BEJ dan telah menerapkan *good corporate governance* pada tahun 1999 sampai dengan 2001. Dalam penelitiannya membahas mengenai bagaimanakah pengaruh *board of director*, dan *audit committee*, terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitiannya, yaitu (a) terdapat hubungan negatif signifikan antara nilai perusahaan dengan independensi audit komite; (b) hasil regresi koefisien *finance audit committee* tidak terdapat hubungan yang signifikan yang berarti tidak terdapat hubungan positif signifikan antara nilai perusahaan dengan *finance audit committee*; (c) tidak terdapat hubungan positif signifikan antara nilai perusahaan dengan *independent board directors*; (d) hasil regresi *tobin's q* dengan variabel *finance directors* menunjukkan hubungan yang negatif tidak signifikan pada level 0,05 , yang berarti tidak terdapat hubungan positif signifikan antara nilai perusahaan dengan *finance board directors*.

Nuswandari (2009) melakukan penelitian tentang pengaruh *corporate governance perception index* terhadap kinerja perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ) pada tahun 2001 sampai dengan 2005. Penelitian ini membahas tentang (a) apakah *Corporate governance perception index* (CGPI) berpengaruh terhadap kinerja operasional perusahaan dan (b) apakah *corporate governance perception index* (CGPI) berpengaruh terhadap kinerja pasar perusahaan. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa pengujian untuk model regresi dengan *return on equity* sebagai variabel dependennya menunjukkan variabel CGPI secara positif signifikan mempengaruhi kinerja operasi. Hanya satu variabel kontrol yang secara statistik signifikan mempengaruhi ROE yaitu variabel ukuran perusahaan sedangkan variabel

komposisi aktiva dan variable kesempatan pertumbuhan tidak memiliki pengaruh secara statistik terhadap kinerja operasi. Hasil analisis regresi model Tobin's Q menunjukkan variabel CGPI secara statistik tidak mempengaruhi kinerja pasar (Tobin's Q). Tidak satu pun variable kontrol yang secara statistik mempengaruhi kinerja pasar. Dengan demikian, *corporate governance* secara statistik tidak mempengaruhi kinerja pasar.

Arifin dan Rachmawati (2006) meneliti tentang pengaruh *corporate governance* terhadap efektivitas mekanisme pengurang masalah agensi pada seluruh perusahaan non keuangan dari tahun 2001-2004 yang terdaftar di BEJ. Dalam penelitiannya membahas tentang apakah baik buruknya *corporate governance* disuatu perusahaan akan mempengaruhi efektivitas suatu mekanisme pengurang masalah agensi. Hasil penelitiannya, yaitu pada hasil uji empiris menunjukkan bahwa nilai *corporate governance* berpengaruh terhadap efektivitas mekanisme hutang, meskipun arahnya berkebalikan dari teori. Pada perusahaan yang bagus *corporate governance*-nya, peningkatan porsi hutang tidak mempengaruhi masalah agensi namun pada perusahaan yang buruk *corporate governance*-nya, peningkatan hutang akan meningkatkan masalah agensi.

## **2.2. Landasan Teori**

### **2.2.1. Teori Sinyal (Signaling Theory)**

Menurut Wolk *et al* (2000) seperti yang dikutip dari Sri Rahayu (2010) teori sinyal menjelaskan mengapa perusahaan mempunyai dorongan untuk

memberikan informasi laporan keuangan pada pihak eksternal. Dorongan perusahaan untuk memberikan informasi karena terdapat asimetri informasi antara perusahaan dan pihak luar karena perusahaan mengetahui lebih banyak mengenai perusahaan dan prospek yang akan datang daripada pihak luar (investor dan kreditor). Kurangnya informasi bagi pihak luar mengenai perusahaan menyebabkan mereka melindungi diri mereka dengan memberikan harga yang rendah untuk perusahaan. Perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan mengurangi informasi asimetri. Salah satu caranya adalah dengan memberikan sinyal pada pihak luar, yaitu salah satunya berupa informasi keuangan maupun non keuangan yang dapat dipercaya dan akan mengurangi ketidakpastian mengenai prospek perusahaan yang akan datang.

Teori sinyal mengemukakan tentang bagaimana seharusnya sebuah perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan. Sinyal ini berupa informasi mengenai apa yang sudah dilakukan oleh manajemen untuk merealisasikan keinginan pemilik. Sinyal dapat berupa promosi atau informasi lain yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut lebih baik daripada perusahaan lain (Sari dan Zuhrohtun,2006).

### **2.2.2. Teori Agensi (Principal Agency Theory)**

Hubungan keagenan merupakan suatu kontrak antara *principal* dengan *agent*. Menurut Darmawati *et al.* (2005), inti dari hubungan keagenan adalah adanya pemisahan antara kepemilikan (*principal/investor*) dan pengendalian (*agent/manajer*). Kepemilikan diwakili oleh investor yang mendelegasikan

kewenangan kepada agen dalam hal ini manajer untuk mengelola kekayaan investor. Investor mempunyai harapan bahwa dengan mendelegasikan wewenang pengelolaan tersebut, mereka akan memperoleh keuntungan dengan bertambahnya kekayaan dan kemakmuran investor.

Menurut Setyapurnama dan Norpratiwi (2004) seperti yang dikutip oleh Rahayu (2010) menyatakan hubungan keagenan dapat menimbulkan masalah pada saat pihak-pihak yang bersangkutan mempunyai tujuan yang berbeda. Tim manajemen diberi wewenang untuk mengambil keputusan yang terkait dengan operasi dan strategi perusahaan dengan harapan keputusan-keputusan yang diambil akan memaksimalkan nilai perusahaan. Banyak keputusan yang diambil manajer yang justru lebih menguntungkan manajer dan mengesampingkan kepentingan pemegang saham (Arifin, 2007;47-48).

*Corporate Governance* merupakan salah satu dasar dalam meningkatkan efisiensi ekonomis, yang meliputi hubungan antara manajemen perusahaan dan stakeholder. *Corporate Governance* (CG) juga diperlukan untuk mengendalikan perilaku pengelola perusahaan (manajer/*agent*) agar tidak hanya bertindak menguntungkan diri sendiri tetapi menyamakan kepentingan antara pemilik perusahaan (*principal*) dan pengelola perusahaan (*agent*).

### **2.2.3. Corporate Social Responsibility (CSR)**

Menurut Darwin (2004), seperti yang dikutip oleh Anggraini (2006) CSR adalah mekanisme bagi suatu organisasi untuk secara sukarela

mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan dan sosial ke dalam operasinya dan interaksinya dengan *stakeholders*, yang melebihi tanggung jawab organisasi dibidang hukum. Menurut *The World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD), *Corporate Social Responsibility* atau tanggung jawab social perusahaan didefinisikan sebagai komitmen bisnis untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan berkelanjutan, melalui kerjasama dengan para karyawan serta perwakilan mereka, keluarga mereka, komunitas setempat maupun masyarakat umum untuk meningkatkan kualitas kehidupan dengan cara yang bermanfaat baik bagi bisnis maupun untuk pembangunan.

Praktik pengungkapan CSR memainkan peranan penting bagi perusahaan karena perusahaan hidup dilingkungan masyarakat dan kemungkinan aktivitasnya memiliki dampak sosial dan lingkungan. Dengan demikian pengungkapan tanggung jawab sosial merupakan alat manajerial yang digunakan perusahaan untuk menghindari konflik sosial dan lingkungan. Selain itu, penungkapan CSR dapat dipandang sebagai wujud akuntabilitas perusahaan kepada publik untuk menjelaskan berbagai dampak sosial yang ditimbulkan perusahaan (Chariri dan Ghozali, 2007;108).

Pertanggungjawaban sosial perusahaan diungkapkan di dalam laporan yang disebut dengan *Sustainability Reporting*. *Sustainability Reporting* adalah pelaporan mengenai kebijakan ekonomi, lingkungan dan sosial, pengaruh dan kinerja organisasi, dan produknya di dalam konteks pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

Pengungkapan sosial yang dilakukan oleh perusahaan umumnya bersifat *voluntary* (sukarela), *unaudited* (belum diaudit), dan *unregulated* (tidak dipengaruhi oleh peraturan tertentu). Menurut Glouter yang dikutip dari Utomo (2000), menyebutkan tema-tema yang termasuk dalam wacana Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial adalah:

1. Kemasyarakatan

Tema ini mencakup aktivitas kemasyarakatan yang diikuti oleh perusahaan, misalnya aktivitas yang terkait dengan kesehatan, pendidikan, dan seni serta pengungkapan aktivitas kemasyarakatan lainnya.

2. Ketenagakerjaan

Tema ini meliputi dampak aktivitas perusahaan pada orang-orang dalam perusahaan tersebut. Aktivitas tersebut meliputi: rekrutmen, program pelatihan, gaji dan tuntutan, mutasi dan promosi, dan lainnya.

3. Produk dan Konsumen

Tema ini melibatkan aspek kualitatif suatu produk atau jasa, antara lain kegunaan *durability*, pelayanan, kepuasan pelanggan, kejujuran dalam iklan, kejelasan/kelengkapan isi pada kemasan, dan lainnya.

4. Lingkungan Hidup

Tema ini meliputi aspek lingkungan dari proses produksi, yang meliputi pengendalian polusi dalam menjalankan operasi bisnis, pencegahan dan perbaikan kerusakan lingkungan akibat pemrosesan sumber daya alam dan konversi sumber daya alam.



#### 2.2.4. Corporate Governance

Kaen (2003) mendefinisikan *corporate governance* sebagai sesuatu tentang siapa yang mengontrol perusahaan dan mengapa dia mengontrol. Cadbury Committe pada (1992) dikutip dari Daniri (2005;6), mendefinisikan *corporate governance* sebagai prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawaban kepada *shareholder* khususnya dan *stakeholder* pada umumnya.

Menurut FCGI (*Corporate Governance Forum for Corporate Governance in Indonesia*) dikutip dari Arifin dan Rachmawati (2006), *corporate governance* memiliki beberapa prinsip dasar meliputi:

1. Adanya hak-hak pemegang saham yang harus diberi informasi yang benar dan tepat waktu, ikut berperan serta dalam pengambilan keputusan mengenai perubahan-perubahan yang mendasar, dan turut memperoleh bagian keuntungan,
2. Adanya perlakuan sama terhadap para pemegang saham terutama kepada pemegang saham minoritas dan asing dengan keterbukaan (*transparansi*) informasi penting, melarang pembagian untuk pihak sendiri, dan melarang perdagangan saham oleh orang dalam (*insider trading*),
3. Diakuinya peran pemegang saham, bersama pemegang kepentingan yang lain dalam menciptakan kekayaan, lapangan kerja, dan perusahaan yang sehat,

4. Adanya kemungkinan pengungkapan (*disclosure*) yang akurat dan tepat pada waktunya serta transparansi atas hal penting bagi kinerja perusahaan, kepemilikan, serta pemegang kepentingan,
5. Adanya tanggung jawab pengurus dalam manajemen, pengawasan manajemen serta pertanggungjawaban kepada perusahaan dan para pemegang saham.

Menurut Newel dan Wilson menyatakan bahwa secara teoritis praktek *good corporate governance* dapat meningkatkan nilai perusahaan diantaranya meningkatkan kinerja keuangan, mengurangi resiko yang muncul akibat tindakan pengelola yang cenderung menguntungkan diri sendiri (Lastanti, 2005). Selain itu pada tahun 2001, Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* menerbitkan pedoman *Good Corporate Governance*. Pedoman ini bertujuan agar dunia bisnis memiliki acuan dasar yang memadahi mengenai konsep serta pola pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang sesuai dengan pola internasional umumnya dan Indonesia khususnya.

Penerapan *corporate governance* diharapkan dapat memaksimalkan nilai perseroan, baik itu bagi perseroan tersebut dan bagi pemegang saham. Dalam penelitian ini *corporate governance* diproksikan ke dalam tiga aspek, yaitu Pemegang Saham Institusional, Komisaris Independen, dan Komite Audit.

#### **2.2.4.1. Pemegang Saham Institusional**

Kepemilikan suatu perusahaan dapat terdiri atas kepemilikan institusional maupun kepemilikan individual. Atau campuran keduanya dengan proporsi tertentu. Kepemilikan saham institusional adalah kepemilikan saham oleh perusahaan asuransi, bank, perusahaan-perusahaan investasi dan kepemilikan oleh institusi-institusi lainnya. Investor institusional memiliki beberapa kelebihan dibanding dengan investor individual, diantaranya yaitu:

1. Investor institusional memiliki sumber daya yang lebih daripada investor individual untuk mendapatkan informasi.
2. Investor institusional memiliki profesionalisme dalam menganalisa informasi, sehingga dapat menguji tingkat keandalan informasi.
3. Investor institusional, secara umum, memiliki relasi bisnis yang lebih kuat dengan manajemen.
4. Investor institusional memiliki motivasi yang kuat untuk melakukan pengawasan lebih ketat atas aktivitas yang terjadi di dalam perusahaan.
5. Investor institusional lebih aktif dalam melakukan jual beli saham sehingga dapat meningkatkan jumlah informasi secara cepat yang tercermin di tingkat harga.

Menurut Jensen dan Meckling (1976) kepemilikan saham institusional merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk mengurangi *agency conflict*. Dengan kata lain semakin tinggi tingkat kepemilikan saham institusional, semakin kuat tingkat pengendalian yang dilakukan oleh pihak eksternal terhadap perusahaan, sehingga *agency cost* yang terjadi di dalam

perusahaan semakin berkurang dan nilai perusahaan juga semakin meningkat (Susanti, dkk., 2010).

Menurut Boediono (2005) dikutip dari Bangun dan Vincent (2008) kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif sehingga dapat mengurangi manajemen laba. Persentase saham tertentu yang dimiliki oleh institusi dapat mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan yang tidak menutup kemungkinan terdapat akrualisasi sesuai kepentingan pihak manajemen.

#### **2.2.4.2. Komisaris Independen**

Dewan komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan pihak manajemen yang dapat mempengaruhinya untuk bertindak independen dan bertindak semata-mata demi kepentingan investor (Haruman, 2007). Secara umum dewan komisaris ditugaskan dan diberi tanggung jawab atas pengawasan kualitas informasi yang terkandung dalam laporan keuangan. Hal ini penting mengingat adanya kepentingan dari manajemen untuk melakukan manajemen laba yang berdampak pada berkurangnya kepercayaan investor. Untuk mengatasinya, dewan komisaris diperbolehkan untuk memiliki akses pada informasi perusahaan.

Fama dan Jensen (1983) dikutip dari Ujiyantho dan Pramuka (2007) menyatakan bahwa *non-executive director* (komisaris independen) dapat bertindak sebagai penengah dalam perselisihan yang terjadi diantara para

manajer internal dan mengawasi kebijakan manajemen serta memberikan nasihat kepada manajemen. Komisaris independen merupakan posisi terbaik untuk melaksanakan fungsi monitoring agar tercipta perusahaan yang *good corporate governance*.

Komposisi dewan komisaris merupakan salah satu karakteristik dewan yang berhubungan dengan kandungan informasi laba. Melalui perannya dalam menjalankan fungsi pengawasan, komposisi dewan dapat mempengaruhi pihak manajemen dalam menyusun laporan keuangan sehingga dapat diperoleh suatu laporan laba yang berkualitas (Boediono, 2005).

#### **2.2.4.3. Komite Audit**

Sesuai dengan keputusan dari ketua BAPEPAM Nomor Kep-29/PM/2004, komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan dan pengelolaan perusahaan. Keberadaan komite audit sangat penting bagi pengelolaan perusahaan. Komite audit dianggap sebagai penghubung antara pemegang saham dan dewan komisaris dengan pihak manajemen dalam menangani masalah pengendalian.

Peran komite audit sangat penting karena mempengaruhi kualitas laba perusahaan yang merupakan salah satu informasi penting yang tersedia untuk publik dan dapat digunakan investor untuk menilai perusahaan. Investor sebagai pihak luar perusahaan tidak dapat mengamati secara langsung kualitas sistem informasi perusahaan sehingga persepsi mengenai kinerja komite audit

akan mempengaruhi penilaian investor terhadap kualitas laba perusahaan (Suaryana,2005).

### **2.2.5. Nilai Perusahaan (Valuasi)**

Nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap perusahaan yang sering dikaitkan dengan harga saham. Harga saham yang tinggi membuat nilai perusahaan juga tinggi. Nilai perusahaan lazim diindikasikan dengan *price to book value*. *Price to book value* yang tinggi akan membuat pasar percaya atas prospek perusahaan ke depan. Hal itu juga yang menjadi keinginan para pemilik perusahaan, sebab nilai perusahaan yang tinggi mengindikasikan kemakmuran pemegang saham juga tinggi.

Menurut Agustina (2008) nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap tingkat keberhasilan perusahaan yang sering dikaitkan dengan harga saham dan profitabilitas. Menurut Wahyudi dan Prasetyaning (2005) menyebutkan bahwa nilai perusahaan merupakan harga yang bersedia dibayar oleh calon pembeli andai perusahaan tersebut dijual. Sedangkan menurut Manurung (2011;7) nilai wajar suatu perusahaan dapat dihubungkan dengan karakteristik keuangan, antara lain dari prospek pertumbuhan, resiko dan aliran kas. Jika terjadi penyimpangan dari nilai wajar maka dapat dikatakan *undervalue* (nilai pasar lebih rendah daripada nilai wajar) atau *overvalue* (nilai pasar lebih tinggi daripada nilai wajar).

Menurut Almilia dan Wijayanto (2007) yang dikutip dari Rustiarini (2010), apabila perusahaan memiliki kinerja lingkungan dan sosial yang buruk

maka akan muncul keraguan dari investor sehingga direspon negatif melalui penurunan harga saham.

Brigham dan Gapenski (1996) seperti yang dikutip oleh Wahidahwati (2002) menyatakan bahwa suatu perusahaan dikatakan mempunyai nilai yang baik jika kinerja perusahaan juga baik. Nilai perusahaan dapat tercermin dari harga sahamnya. Jika nilai sahamnya tinggi bisa dikatakan nilai perusahaannya juga baik. Karena tujuan utama perusahaan adalah meningkatkan nilai perusahaan melalui peningkatan kemakmuran pemilik atau para pemegang saham.

Herwidayatmo mengatakan nilai perusahaan dapat dilihat melalui nilai pasar atau nilai buku perusahaan dari ekuitasnya. Ia menambahkan dalam neraca keuangan, ekuitas menggambarkan total modal perusahaan. Selain itu, nilai pasar bisa menjadi ukuran nilai perusahaan. Penilaian terhadap perusahaan tidak hanya mengacu pada nilai nominal. Menurutnya kondisi perusahaan mengalami banyak perubahan setiap waktu secara signifikan. Sebelum krisis nilai perusahaan dan nominalnya cukup tinggi. Tapi setelah krisis kondisi perusahaan merosot sementara nilai nominalnya tetap (Tempointeraktif.com, dalam Kurniawan,2008).

### **2.3. Pengembangan Hipotesis Penelitian**

#### **2.3.1. Corporat social Responsibility (CSR) dengan Nilai Perusahaan**

Menurut Tilt CA (1994) seperti yang dikutip dari Titisari dkk (2010), perusahaan semakin menyadari bahwa kelangsungan hidup perusahaan juga

tergantung dari hubungan perusahaan dengan masyarakat dan lingkungannya tempat perusahaan beroperasi. Hal ini sejalan dengan *legitimacy theory* yang menyatakan bahwa perusahaan memiliki kontrak dengan masyarakat untuk melakukan kegiatannya berdasarkan nilai-nilai *justice*, dan bagaimana perusahaan menanggapi berbagai kelompok kepentingan untuk melegitimasi tindakan perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Gunawan dan Utami (2008) memperoleh hasil bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, artinya bahwa CSR merupakan faktor yang mempengaruhi tinggi atau rendahnya nilai perusahaan. Hasil penelitian Harjoto dan Jo (2007) seperti yang dikutip dari Rustiarini (2010) juga menemukan bahwa pengungkapan CSR berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Selain itu, Ahmad, *et al.* (2003) di Malaysia menemukan bukti bahwa pengungkapan CSR mencerminkan usaha-usaha perusahaan untuk meningkatkan citra perusahaan dan agar dapat dilihat sebagai perusahaan yang bertanggungjawab (Gunawan dan Utami, 2008).

Zuhroh dan Heri (2003) menyatakan bahwa pengungkapan sosial dalam laporan tahunan perusahaan yang *go public* telah terbukti berpengaruh terhadap volume perdagangan saham bagi perusahaan yang masuk kategori *high profile*. Artinya bahwa investor sudah mulai merespon dengan baik informasi-informasi sosial yang disajikan perusahaan dalam laporan tahunan. Semakin luas pengungkapan sosial yang dilakukan perusahaan dalam laporan tahunan ternyata memberikan pengaruh terhadap volume perdagangan saham



perusahaan dimana terjadi lonjakan perdagangan pada seputar publikasi loperan tahunan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini, yaitu :

**H<sub>1</sub> : *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap nilai perusahaan.**

### **2.3.2. Pemegang Saham Institusional dengan Nilai Perusahaan**

Slovin dan Sushka (1993) menyatakan bahwa nilai perusahaan dapat meningkat jika institusi mampu menjadi alat monitoring yang efektif (Wahyudi dan Pawestri, 2006). Suranta dan Machfoedzs (2003) dalam penelitiannya menyatakan bahwa nilai perusahaan (Tobin's Q) dipengaruhi oleh kepemilikan manajerial, institusional, ukuran dewan direksi.

Cornet *et. Al.*, (2006) yang dikutip dari Bangun dan Vincent (2008) menemukan adanya bukti yang menyatakan bahwa tindakan pengawasan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dan investor institusional dapat membatasi perilaku para manajer. Cornet *et. Al.*,(2006) menyimpulkan bahwa tindakan pengawasan oleh pihak investor institusional dapat mendorong pihak manajer untuk lebih memfokuskan perhatiannya terhadap kinerja perusahaan sehingga akan mengurangi perilaku *opportunistic* atau perbuatan menguntungkan diri sendiri.

Shleifer and Vishny (1997) dikutip dari Barnae dan Rubin (2005) bahwa *institutional shareholders*, dengan kepemilikan saham yang besar,

memiliki insentif untuk memantau pengambilan keputusan perusahaan. Kepemilikan institusional dalam proporsi yang besar juga mempengaruhi nilai perusahaan. Nilai perusahaan dapat meningkat jika lembaga institusi mampu menjadi alat pemantauan yang efektif. Hasil penelitian Xu dan Wang (1997), Pizarro *et al.* (2006), dan Bjuggren *et al.* (2007) dikutip dari Rustiarini (2010) menemukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah :

**H<sub>2</sub> : Pemegang Saham Institusional berpengaruh terhadap nilai perusahaan.**

### **2.3.3. Komisaris Independen dengan Nilai Perusahaan**

Veronica dan Bachtiar (2004) menemukan bahwa variabel persentase dewan komisaris independen tidak berkorelasi secara signifikan terhadap akrual kelolaan, walau begitu interaksi antar variabel akrual kelolaan dan dewan komisaris independen menunjukkan koefisien positif yang signifikan terhadap *return* perusahaan. Hal tersebut dapat dijelaskan dengan makin tingginya persentase dewan komisaris independen maka akrual kelolaan makin berpengaruh terhadap *return*.

Siallagan dan Machfoedz (2006) dikutip dari Susanti dkk (2010) menggunakan proporsi komisaris independen untuk mengetahui pengaruhnya terhadap kualitas laba yang diukur dengan *discretionary accruals* dan nilai

perusahaan yang diukur dengan Tobin's Q, menemukan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh secara negatif terhadap kualitas laba, sedangkan berpengaruh secara positif terhadap nilai perusahaan.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah :

**H<sub>3</sub> : Komisaris Independen berpengaruh terhadap nilai perusahaan.**

#### **2.3.4. Komite Audit dengan Nilai Perusahaan**

Penelitian Veronica dan Utama (2005) menguji pengaruh keberadaan komite audit dalam perusahaan terhadap manajemen laba. Penelitian tersebut melaporkan bahwa variabel keberadaan komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba perusahaan. Artinya keberadaan komite audit tidak mampu mengurangi manajemen laba yang terjadi di perusahaan. Penelitian oleh Veronica dan Bachtiar (2004) menemukan bahwa komite audit memiliki hubungan yang signifikan dengan akrual kelolaan perusahaan manufaktur di Indonesia khususnya untuk periode 2001- 2002, artinya kehadiran komite audit secara efektif menghalangi peningkatan manajemen laba di perusahaan tersebut.

Penelitian Siallagan dan Machfoedz (2006) dikutip dari Susanti dkk (2010) menguji pengaruh kualitas laba terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEJ pada periode 2000-2004 menyatakan bahwa keberadaan komite audit mempunyai pengaruh positif terhadap kualitas laba dan juga nilai perusahaan yang dihitung dengan Tobin's

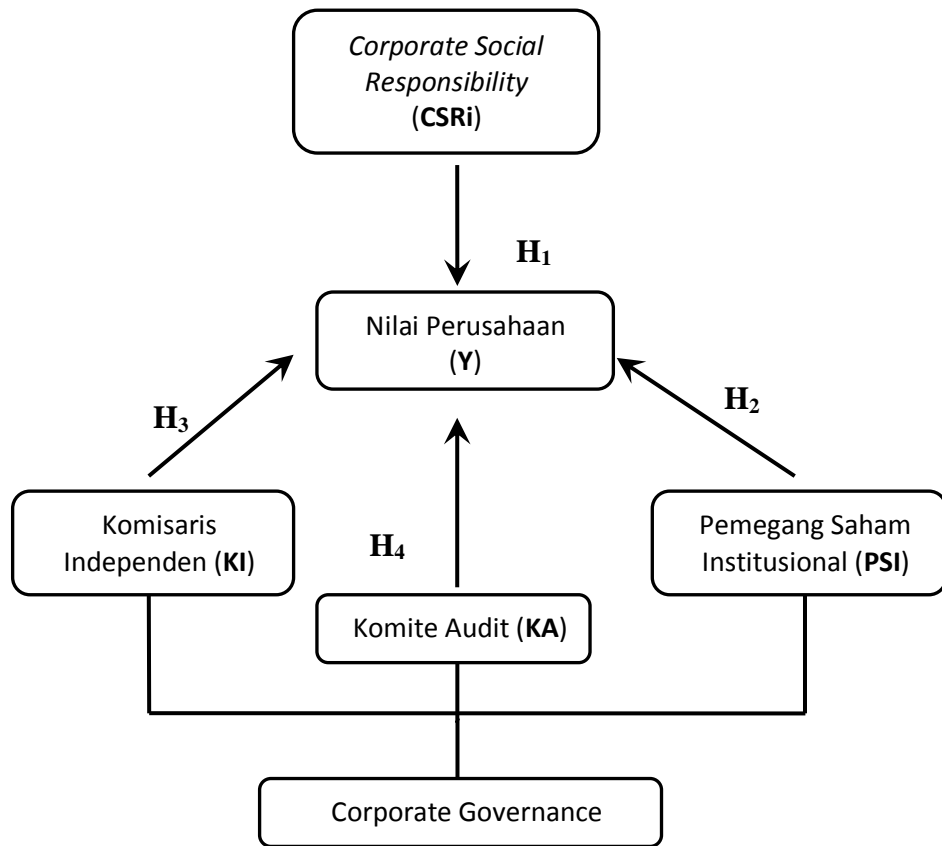
Q. Hal ini memberi bukti bahwa keberadaan komite audit dapat meningkatkan efektifitas kinerja perusahaan.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah :

**H<sub>4</sub> : Komite Audit berpengaruh terhadap nilai perusahaan.**

#### **2.4. Kerangka Konseptual**

Dari gambar kerangka dibawah ini menunjukkan pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSRI), pemegang saham institusional (PSI), komisaris independen (KI), dan komite audit (KA) berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Perusahaan yang berkomitmen melakukan CSR akan memiliki nilai yang baik dihadapan investor, yaitu dengan mengalami kenaikan harga saham secara signifikan. Kepemilikan saham institusioanal dalam proporsi yang besar disuatu perusahaan juga dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Proporsi komisaris independen dan keberadaan komite audit mempunyai pengaruh terhadap nilai perusahaan.



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Konseptual**